

METODE EVALUASI PEMBELAJARAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK DIFABEL NETRA

Hendro Sugiyono Wibowo

Staf Balai Besar Rehabilitasi Vocasional Bina Daksa (BBRVBD)
di Cibinong Jawa Barat

Abstract

Evaluation is an important process as it determines whether or not the learning process has been successful. Therefore, It should carefully take into account the various aspects of students' performances and styles of learning in order to provide an accurate description of the progress of each individual student. This is particularly true for students with disabilities who are diverse in terms of their physical, mental, sensory, and motor ability. Such a situation necessitates that teachers develop evaluation methods that corresponds to these differences.

Some educational institutions have indeed made an attempt to modify their evaluation method to address the specific needs of students with disabilities. Some modifications include computer-based evaluation, use of screen readers (for those with visual impairment), oral exam, or providing a reader and note taker. In the implementation however, effective communication between students and the teacher/ lecturer is required to ensure that the best evaluation method is selected for individual students.

Key Words: *Learning Evaluation, Visually Handicapped*

Abstrak

Dalam dunia pendidikan, evaluasi pembelajaran memiliki peranan penting dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Untuk itu, evaluasi pembelajaran perlu dilaksanakan secara seksama agar dapat memberikan gambaran ideal tentang perkembangan masing-masing individu peserta didik. Namun begitu, kondisi peserta didik yang berbeda-beda dilihat dari segi latar-belakang fisik, mental, sensorik, dan motorik membuat media

dan bentuk evaluasi yang dibutuhkan berbeda antar satu peserta didik dengan lainnya. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran dari pendidik untuk dapat melakukan berbagai modifikasi inovatif terkait dengan bentuk dan media evaluasi pembelajaran untuk menjawab permasalahan di atas.

Beberapa bentuk modifikasi media dan bentuk evaluasi pembelajaran sudah pernah dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan dalam melayani peserta didik difabel. Di antara modifikasi-modifikasi media dan bentuk evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan untuk melayani peserta didik difabel (khususnya difabel netra) meliputi ujian mandiri dengan bantuan komputer bicara, ujian dengan pendamping resmi, ujian dengan pendamping bebas, dan ujian lisan. Bentuk-bentuk ujian tersebut merupakan alternative yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, dalam penerapannya dibutuhkan komunikasi yang efektif antara pendidik dan peserta didik. Sebab, kesalahan memilih bentuk dan media dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran akan berakibat fatal terhadap hasil evaluasi itu sendiri.

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana fenomena-fenomena yang diungkap dijelaskan dengan narasi deskriptif. Adapun untuk teknik pengumpulan data penulis menggali dari tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan difabilitas. Disamping itu, penulis juga melakukan beberapa wawancara untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

Kata Kunci: *Evaluasi Pembelajaran, Difabel Netra*

A. Pendahuluan

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (UUD 1945). Mendapat pendidikan tentunya bukan dalam arti memperoleh pengajaran saja, akan tetapi komponen-komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan keberhasilan suatu proses pendidikan juga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan. Sebab, kurangnya pemenuhan salah satu komponen dalam pendidikan akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam pendidikan.

Pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara tentunya bukan hanya diberikan pada golongan atau ras tertentu, melainkan seluruh warga negara dengan berbagai latar-be-

lakang yang berbeda harus diakomodasi agar tercapai asas keadilan, demokratis, dan non-diskriminatif yang merupakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan (Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa) (UUD No 20 tahun 2003). Kita bisa menyadari bersama, bahwa bangsa Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan yang luas sudah pasti juga memiliki suku, ras, budaya, agama, kepercayaan yang berbeda-beda. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan perbedaan dari sisi fisik, motoric, sensorik, intelektual dan/ atau psikis, seperti warga negara yang mengalami difabel netra, difabel rungu/ wicara, difabel fisik, difabel mental retardasi, dan sebagainya, agar menjadi satu bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang adaptif bagi mereka yang mengalami kekurangan fisik dan keterbelakangan mental.

“Sistem pendidikan adaptif” yang dimaksud pada paragraph di atas ialah suatu system pendidikan yang pada tataran implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi seluruh anak didik baik anak didik non-difabel maupun difabel. Hal ini berarti bahwa sebuah sistem pendidikan harus dirancang agar dapat diterapkan secara inklusif. Sedangkan untuk merancang atau mendesain suatu sistem pendidikan yang inklusif harus memperhatikan 7 prinsip *universal design*, antara lain (<http://universaldesign.ie/>):

1. Penggunaan yang adil (*equitable use*): sebuah sistem atau kurikulum pendidikan harus didesain secara implementatif bagi peserta didik dengan latar-belakang kemampuan yang beragam.
2. Fleksibel dalam penerapan (*flexibility in use*): sebuah system atau kurikulum pendidikan harus didesain untuk mengakomodasi berbagai macam pilihan dan kemampuan dari masing-masing individu yang menjadi peserta didik.
3. Penggunaan yang mudah dan intuitif (*simple and intuitive use*): sebuah sistem atau kurikulum pendidikan harus mudah dipahami tanpa memperhatikan pengalaman, keterampilan bahasa, dan tingkat konsentrasi sekarang ini dari pengguna desain tersebut.
4. Informasi yang jelas (*perceptible information*): sebuah sistem atau

kurikulum pendidikan harus menyampaikan informasi penting secara efektif kepada pengguna.

5. Toleransi akan kesalahan (*tolerance for Error*): sebuah sistem atau kurikulum pendidikan harus meminimalisir resiko dan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang bersifat *incidental* atau tidak dikehendaki.
6. *Low physical effort*: sebuah sistem atau kurikulum pendidikan dapat diterapkan secara efisien, menyenangkan, dan dapat meminimalisir kelelahan fisik.
7. Ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan (*size and space for approach and use*): sebuah system atau kurikulum pendidikan harus menyediakan ukuran dan ruang guna melakukan pendekatan, pencapaian, manipulasi, dan penggunaan, dengan meniadakan hambatan yang dapat dialami pengguna akibat ukuran atau postur tubuh dan mobilitas.

Ketujuh hal di atas sangat penting diperhatikan dalam mendesain sebuah kurikulum atau sistem pendidikan. Sayangnya, tidak semua kurikulum pembelajaran di Negara kita didesain dengan mengedepankan prinsip universal design. Sebagai contoh, pengkotakan pelaksanaan program pendidikan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah umum menunjukkan adanya kurikulum kita yang didesain tanpa memperhatikan prinsip universal design. Bahkan, pemerintah malah menyusun kurikulum khusus yang diperuntukan bagi SLB. Dari sini jelas bahwa sistem pendidikan di Indonesia benar-benar mengalami pengkotak-kotakan dilihat dari segi peserta didik.

Dalam perkembangannya, kurikulum pendidikan 2013 sebagai kurikulum pendidikan terbaru juga tak luput dari berbagai kritik. Menurut kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Yogyakarta, Drs. Katarmanto Bagaskara Aji, dalam sebuah wawancara dengan wartawan situs www.solider.or.id menyatakan bahwa kurikulum 2013 bersifat diskriminatif dan belum menyentuh anak berkebutuhan khusus (ABK) (Wijaya, 2013). Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 mengeluarkan buku kurikulum khusus untuk ABK, sebagaimana telah dilansir oleh situs resmi Mendikbud pada 13 Februari 2014 (www.kemdiknas.go.id). Hal ini tentu semakin memperjelas adanya pengkotak-kotakan pendidikan dilihat dari segi peserta didik (difabel dan non-difabel).

Di tengah-tengah pengkotakan sistem pendidikan antara SLB dan sekolah umum, muncul kemudian sistem pendidikan inklusi. Sistem pendidikan inklusi ini mulai diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia sejak 1999 dengan bantuan teknis dari Universitas Oslo (<http://file.upi.edu>). Namun pada kenyataannya sudahkah sistem pendidikan inklusi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat difabel akan hak mereka atas pendidikan?

Beberapa perkembangan pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di Indonesia dapat disimak pada table di bawah ini (Sunaryo):

Tabel 1:

Trend Pendidikan Inklusi di Indonesia Berdasarkan Jumlah Sekolah dan Siswa Tahun 2004-2007

| No | Tahun | Jumlah Sekolah | Jumlah Siswa |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1. | 2004 | 467 | 2.573 |
| 2. | 2005 | 504 | 6.000 |
| 3. | 2006 | 600 | 9.492 |
| 4. | 2007 | 796 | 15.181 |

Prosentase peningkatan jumlah sekolah inklusi dan jumlah siswa difabel yang duduk di bangku sekolah inklusi dari tahun 2005-2007 dapat disimak pada table di bawah ini:

Tabel 2:

Prosentase Peningkatan Jumlah Sekolah dan Siswa Inklusi Tahun 2005-2007

| No | Tahun | Prosentase Jumlah Sekolah | Prosentase Jumlah Siswa |
|----|-------|---------------------------|-------------------------|
| 1. | 2005 | 7.9 | 133 |
| 2. | 2006 | 19 | 58 |
| 3. | 2007 | 33 | 59 |

Adanya peningkatan jumlah sekolah inklusi dan jumlah siswa difabel yang mengenyam pendidikan inklusi dari tahun ke tahun tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Namun begitu, Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud, Mudjito menyatakan bahwa saat ini 184.000 anak difabel belum dapat menikmati pendidikan sebagaimana anak non-difabel pada

umumnya (Slamet, 2015). Untuk itu, masih butuh kerja panjang untuk menerapkan system pendidikan inklusi di Indonesia secara menyeluruh, terutama dalam hal menyelaraskan kurikulum agar mampu menjawab kebutuhan dari seluruh peserta didik dengan keanekaragaman kemampuan, latar-belakang budaya, dan sebagainya.

Hal lain yang perlu dicermati dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah kompetensi pedagogis yang dimiliki oleh tenaga pengajar. Sebab, adanya kurikulum yang selama ini didesain dengan mengabaikan prinsip universal desain membuat implementasi kurikulum cenderung kaku dan non-adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Padahal, konsep pendidikan inklusi sebenarnya dimaksudkan agar desain pelaksanaan pendidikan dapat diterapkan kepada seluruh peserta didik yang sudah pasti memiliki keberagaman dalam berbagai aspek kemampuan dan berbagai latar-belakang baik fisik, psikis, motoric, sensorik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini peran kemampuan guru dalam melakukan berbagai modifikasi metode, media, dan juga evaluasi pembelajaran sangat penting untuk mengikis jarak antara kurikulum yang non-adaptif dengan kondisi peserta didik yang beragam untuk mewujudkan terlaksananya suatu sistem pembelajaran yang inklusif.

Aspek evaluasi pendidikan, sebagai suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur capaian program pembelajaran sangatlah penting. Sebab, dari rincian hasil belajar yang telah dicapai, akan didapatkan suatu landasan untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk itu, program evaluasi pembelajaran harus mendapatkan perhatian sebanyak pelaksanaan program pembelajaran itu sendiri. Sebab, apabila hasil evaluasi pembelajaran tidak dapat menjelaskan kondisi obyektif dari peserta didik, maka tujuan dari pendidikan itu sendiri akan tidak tercapai atau bahkan cenderung merugikan pihak tertentu, dalam hal ini peserta didik. Sebagai contoh, jika seorang siswa tubuhnya yang tremor (selalu bergetar) sehingga dia tidak dapat menulis cepat, maka pada saat ia mengerjakan soal dalam bentuk essay dan hasilnya sangat rendah, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, anak tersebut memiliki kemampuan akademik yang bagus, hanya saja karena dia tidak dapat menulis dengan cepat, maka dia tidak dapat menyelesaikan semua soal dalam waktu yang telah ditentukan.

Kemungkinan kedua, anak tersebut memiliki kemampuan akademik yang tidak menonjol, ditambah lagi dengan kondisinya yang tremor yang menyebabkan dia tidak dapat mengerjakan soal secara maksimal. Oleh karena itu, kondisi yang demikian jelas tidak obyektif, karena selain dipengaruhi oleh kemampuan akademisnya, hasil evaluasi juga sangat bergantung pada kondisi masing-masing individu peserta didik.

Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan bahasan pada evaluasi pembelajaran inklusif bagi difabel. Penulis memandang bahwa pokok bahasan ini sangat penting mengingat evaluasi merupakan bagian dari kurikulum yang jarang mendapatkan perhatian yang serius dari sivitas akademik. Hal ini terlihat dari beberapa proses pencarian melalui *search engine* yang dilakukan oleh penulis menunjukkan sedikitnya hasil yang terkait dengan evaluasi pembelajaran inklusif. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan pengembangan metode, media, dan model pembelajaran inklusi sudah sering dilakukan oleh para pemerhati pendidikan.

Namun begitu, dalam tulisan ini, penjelasan mengenai modifikasi evaluasi pembelajaran akan menitik beratkan pada evaluasi pembelajaran bagi difabel netra. Pasalnya, difabel netra yang memiliki ketewrbatasan dalam hal pengelihatian, cenderung memiliki kebutuhan media yang berbeda dalam hal pembelajaran. Media-media seperti braille, komputer bicara, braille display, dan sebagainya masih jarang didapatkan di institusi-institusi pendidikan. Sedangkan untuk dapat memiliki media-media tersebut dibutuhkan biaya yang cukup mahal.

Di samping itu, kecepatan membaca dengan meraba (huruf braille) berbeda jauh dengan kecepatan membaca dengan indra pengelihatian. Berbeda pula kecepatan orang membaca dengan menyuarakan apa yang dibaca dengan orang yang membaca langsung dalam hati. Singkatnya, difabel netra membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membaca sekaligus memahami soal evaluasi. Contoh real pengalaman penulis dalam menjalankan tes evaluasi pembelajaran. Pada saat itu, penulis masih duduk di bangku SMA inklusi. Sewaktu melaksanakan ujian semester, penulis diharuskan menyelesaikan 60 (enam puluh) soal dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) menit. Jika dihitung dengan rumus matematika, maka berarti setiap 1,5 (satu setengah) menit penulis harus sudah mengerjakan 1 (satu) soal. Ujian tersebut

dilaksanakan dengan model pendampingan, dimana terdapat seorang guru yang membacakan soal ujian. Permasalahan yang kemudian timbul adalah dalam tingkat kesukaran tertentu, missal dalam membacakan soal Matematika yang penuh dengan angka, atau bahasa yang penuh dengan teks-teks panjang, maka bias jadi seorang guru pendamping ujian akan membutuhkan waktu lama dalam membacakan soal tersebut. Belum lagi dihitung dengan waktu siswa untuk berpikir menemukan jawaban yang tepat.

Untuk itu, slogan “kesamaan kesempatan” tidak dapat ditafsirkan sama waktunya, sama media yang digunakan, dan sebagainya. Slogan ini harus diartikan seadil-adilnya dalam batas kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Sebab, tidak mungkin kita paksakan orang yang membaca dengan huruf braille, atau yang membaca dengan dilafalkan akan sama dengan orang yang membaca dengan indra penglihatan tanpa dilafalkan. Begitu juga mereka yang tremor dan tidak dapat menulis cepat, tidak dapat disamakan dengan mereka yang dapat menulis dengan cepat. Untuk itu, modifikasi-modifikasi media adalah kewajiban setiap guru dan institusi pendidikan untuk mengadakannya, bukan hanya dalam hal proses pembelajarannya, tetapi dalam aspek evaluasi pembelajaran hal ini juga perlu ditekankan sebagaimana mestinya.

B. Teori Evaluasi Pendidikan

1. Pengertian evaluasi pendidikan

Untuk dapat memahami makna evaluasi, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pengukuran (*Measurement*) dan penilaian. Sebab, kedua kata tersebut memiliki kedekatan makna dengan kata evaluasi.

Pengukuran yang dalam bahasa inggris dikenal dengan *measurement* dan dalam bahasa Arab *muqayasah* dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Pengukuran bersifat kuantitatif. Sementara penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Jadi penilaian itu bersifat kualitatif. Sedangkan evaluasi bersifat kualitatif. Evaluasi

pada dasarnya adalah merupakan penafsiran atau interpretasi yang sering bersumber pada data kuantitatif. Meskipun sering dikatakan bersumber pada data yang bersifat kuantitatif, namun menurut Prof. Dr. Masroen, M.A (1979) dikemukakan bahwa tidak semua penafsiran itu bersumber dari keterangan-keterangan yang bersifat kuantitatif. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini, misalnya keterangan-keterangan yang mengenai hal-hal yang disukai siswa, informasi yang datang dari orang tua siswa, pengalaman-pengalaman masa lalu, dan lain-lain, yang kesemuanya itu tidak bersifat kuantitatif melainkan bersifat kualitatif (Sudiojono, 1996).

Adapun pengertian evaluasi menurut beberapa ahli di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut M. khabib Thoha, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan (Thoha, 1996).
- b. Menurut Edwin Wand dan Gerald W. Brown yang disadur oleh Wayan Nur Kancana dan PPN Sumartana mengatakan "*evaluasi refer to the act or process to determining the value of something*" (evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu).
- c. Menurut Anas Sudijono evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya (Sudiojono, 1996).

Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pada intinya evaluasi pendidikan merupakan suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk menilai agar dapat diketahui hasil-hasil yang telah dicapai dengan memperhatikan juga aspek proses pembelajaran sebagai satu hal yang terintegrasi. Untuk dapat mengetahui hasil-hasil dari proses pembelajaran secara obyektif, maka tiap peserta didik haruslah mendapatkan bentuk evaluasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh, seorang siswa difabel netra membutuhkan soal ujian dalam bentuk braille atau soft-copy sehingga ia dapat membaca soal evaluasi secara mandiri.

2. Obyek evaluasi pendidikan

Salah satu cara untuk mengenal atau mengetahui obyek dari evaluasi pendidikan adalah dengan jalan menyurutinya dari tiga

segi, yaitu: dari segi input, transformasi, dan output. Input kita anggap sebagai bahan mentah, transformasi kita anggap sebagai dapur pengolahan bahan mentah, dan output kita anggap sebagai hasil pengolahan yang dilakukan di dapur dan siap untuk dipakai.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, input atau bahan mentah yang siap untuk diolah tidak lain adalah calon peserta didik. Ditilik dari segi input ini, maka obyek dari evaluasi pendidikan meliputi tiga aspek, yaitu: aspek kemampuan, aspek kepribadian, dan sikap (Sudjojono, 1996).

3. Prinsip-prinsip evaluasi pendidikan

- a. Kontinuitas. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang pengajar harus dapat mengetahui perkembangan kemampuan peserta didiknya, baik dari ranah kognitif, afektif, maupun motoric. Untuk dapat mengetahui perkembangan peserta didik secara optimal, maka diperlukan evaluasi pembelajaran secara berkesinambungan.
- b. Keseluruhan. Evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Tidak dibenarkan adanya pengecualian dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran yang disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi fisik, mental, psikis, dan sebagainya. Contoh, seorang guru yang mengajar di sebuah kelas yang inklusi, di mana di dalamnya terdapat seorang siswa difabel netra, ia tetap harus mengikutsertakan siswa tersebut. Pengikutsertaan siswa difabel netra tersebut dapat dilakukan dengan memodifikasi media atau bentuk evaluasi agar dapat diakses oleh siswa tersebut.
- c. Obyektifitas. Sebuah evaluasi hasil pembelajaran harus dilaksanakan secara obyektif berdasarkan hasil yang riil dari instrument-instrumen evaluasi yang digunakan.
- d. Kooperatif. Evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan dengan mengedepankan kerjasama antara pengajar dengan peserta didik, terutama dalam hal mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa dengan kondisi tertentu (Arifin, 1991).

4. Tujuan evaluasi pendidikan

Tujuan pengajaran merupakan kriteria pokok dalam penilaian, oleh karena itu tidak mungkin dapat menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar siswa tanpa merumuskan tujuan terlebih

dahulu.

Tujuan evaluasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan arah evaluasi itu sendiri. Tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus.

- a. Tujuan umum: 1) Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik, setelah mereka mengikuti proses pengajaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain tujuan umum dalam evaluasi pendidikan adalah untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler, setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 2) Untuk mengetahui tingkat efektifitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama dalam jangka waktu tertentu. Jadi tujuan umum yang kedua dari evaluasi pendidikan adalah untuk mengukur dan menilai sampai dengan dimanakah efektifitas mengajar atau metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik.
- b. Tujuan Khusus: 1) Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. 2) Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara perbaikannya (Sudiojono, 1996).

5. Fungsi evaluasi pendidikan

Secara menyeluruh fungsi evaluasi dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Secara psikologis anak didik selalu butuh untuk mengetahui sejauh mana ia berjalan menuju kepada tujuan yang hendak dicapai. Dalam pendidikan dan pengajaran anak

didik juga perlu mengetahui prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Untuk itu, guru perlu mengadakan evaluasi terhadap prestasi belajar anak didiknya.

- b. Secara sosiologis evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah anak didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Hal ini penting karena mampu tidaknya anak didik terjun ke masyarakat akan memberikan warna tersendiri terhadap institusi pendidikan yang bersangkutan.
- c. Secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan anak didik dalam kelompok tertentu sesuai dengan kemampuannya serta membantu guru dalam memperbaiki metode pengajarannya (Sudiojono, 1996).

6. Teknis evaluasi pendidikan

Ada dua jenis teknik evaluasi pendidikan yaitu tes dan non tes.

a. Tes

Secara harfiah kata tes berasal dari bahasa Perancis kuno: *testum* yang artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia (maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring itu akan diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi). Dalam bahasa Inggris ditulis dengan *test* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian, atau percobaan. Dalam bahasa Arab *imtihan*. Test adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Testing berarti saat dilaksanakannya atau peristiwa berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Tester artinya orang yang melaksanakan tes, pembuat tes, atau experimenter yaitu orang yang sedang melakukan percobaan. Testee adalah pihak yang sedang dikenai tes (peserta tes) atau pihak yang dikenai percobaan (Sudiojono, 1996).

Tes sendiri dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu: tes tulisan, tes lisan, dan tes perbuatan (Arifin, 1991).

b. Non Tes

Teknik non tes merupakan alat penilaian yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan peserta didik atau peserta tes tanpa melalui tes dengan alat tes. Sebagaimana yang diketahui bahwa informasi tentang peserta

didik yang dibutuhkan untuk menilai hasil belajar tidak semuanya harus berupa skor hasil pengukuran yang salah satunya lewat tes. Tidak sedikit informasi hasil belajar atau juga yang lain yang justru lebih tepat diungkap, disadap, dan diperoleh melalui cara-cara selain pengukuran (Nurgiantoro, 2010). Teknik non tes terdiri atas berbagai teknik antara lain: observasi, wawancara, skala sikap, check list, dan rating skill (Arifin, 1991).

C. Metodologi Penulisan

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2005). Dengan pendekatan ini penulis akan berupaya mendeskripsikan bagaimana evaluasi pembelajaran dalam setting kelas inklusi dapat diterapkan agar didapatkan hasil evaluasi yang optimal dan dapat menggambarkan kemampuan dari peserta didik secara obyektif.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan kualitatif dapat dilakukan dengan observasi, interview, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 2010). Selain itu, data-data berupa interview yang akan penulis gunakan sebagian merupakan data dari interview yang pernah penulis lakukan sebelumnya, yakni pada saat penulis mengerjakan tugas akhir guna keperluan menyelesaikan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga. Di samping itu, penulis juga akan melakukan beberapa interview untuk melengkapi data dalam tulisan ini

D. Evaluasi Pembelajaran bagi Peserta Didik Difabel

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa evaluasi pendidikan memiliki peranan penting dalam menyukseskan tujuan pendidikan. Hasil dari evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus merupakan rangkaian tali-temali yang saling terjalin erat, di mana daripadanya dideskripsikan suatu perkembangan individu baik dari segi kognitif, afektif maupun motoric. Untuk itu, hasil evaluasi pembelajaran yang ideal merupakan syarat mutlak tercapainya tujuan pendidikan.

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu sendiri seringkali terbentur dengan kondisi peserta didik. Peserta didik yang memiliki

berbagai macam kondisi yang berbeda-beda, terutama mereka yang mengalami kondisi khusus sudah barang tentu memiliki kebutuhan khusus dalam menghadapi evaluasi pembelajaran. Untuk itu, diperlukan berbagai modifikasi-modifikasi yang inofatif dan kreatif agar semua peserta didik dapat melaksanakan evaluasi pembelajaran dan mendapatkan hasil ideal yang menggambarkan kemampuan kognitif, afektif, dan juga motoric yang sebenarnya.

Terkait dengan paragraph di atas, ada beberapa bentuk modifikasi pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa instansi sebagai usaha melayani kebutuhan difabel sebagai peserta didik. Di antaranya akan kami jabarkan sebagai berikut:

1. Ujian mandiri dengan komputer bicara

Ujian mandiri dengan bantuan komputer bicara ini pertama kali diterapkan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ujian mandiri ini dilaksanakan sejak tahun 2006 dan merupakan gagasan dari Dra. Soepasetijantini, M.Pd, yang pada waktu itu menjabat sebagai Kasubag TU Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ujian mandiri dengan komputer bicara ini diadakan sebagai respon adanya ketidakpercayaan dari beberapa dosen pengampu mata kuliah di fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga terhadap hasil ujian mahasiswa difabel netra. Sebab, ujian yang sebelumnya dilaksanakan dengan pendampingan oleh teman sesama mahasiswa menimbulkan kecurigaan akan adanya kecurangan dimana pendamping yang bertugas membacakan dan menuliskan jawaban bias jadi ikut membantu dalam hal mencari jawaban (Wibowo, 2011).

Adapun tahapan pelaksanaan ujian mandiri dengan komputer bicara kami jabarkan sebagai berikut (Wibowo, 2011):

- a. Mahasiswa difabel netra membaca soal dalam bentuk huruf braille atau membaca soal dalam bentuk soft copy.
- b. Mahasiswa difabel netra menuliskan jawaban mereka dengan mengetikkannya pada komputer bicara yang sudah disediakan.
- c. Sesudah selesai mengerjakan ujian, mahasiswa difabel netra melapor pada petugas yang mengawasi pelaksanaan ujian mandiri.
- d. Petugas kemudian merapikan dokumen hasil ujian dan

mengeprintnya.

5. Ujian dengan pendampingan

Ujian dengan pendampingan disini penulis bagi dalam 2 (dua) kategori. Pertama, ujian dengan pendamping resmi dan yang kedua ujian dengan pendamping bebas.

a. Ujian dengan pendamping resmi.

Ujian dengan pendamping resmi adalah ujian yang dilaksanakan dengan pendamping resmi yang ditugaskan oleh institusi pendidikan atau lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk memberikan pendampingan ujian. Dalam hal ini, beberapa contoh yang dapat kita ambil adalah pelaksanaan ujian untuk peserta didik difabel netra di sekolah-sekolah inklusi dan di perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1) Ujian dengan pendamping resmi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai universitas inklusi, UIN Sunan Kalijaga memiliki lembaga khusus yang menangani masalah-masalah mahasiswa difabel. Lembaga tersebut didirikan sejak 2007 dan diberi nama Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD). Pada awalnya, lembaga ini merupakan lembaga otonom non-struktural. Sampai akhirnya pada tahun 2014 lembaga ini disyahkan sebagai lembaga struktural kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan berganti nama menjadi Pusat Layanan Difabel (PLD).

Lembaga ini fokus menangani permasalahan-permasalahan mahasiswa difabel baik masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi kampus. Untuk itu, berbagai kegiatan advokasi dan pendampingan dilaksanakan oleh PLD untuk mendorong terwujudnya berbagai layanan inklusif bagi mahasiswa difabel. Salah satu wujud real hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah adanya *difabel corner* (layanan khusus difabel di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), dan adanya kegiatan pendampingan ujian yang saat ini dilaksanakan secara resmi dengan surat tugas pendampingan dari PLD.

Pada awalnya, kegiatan evaluasi pembelajaran di

kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baik itu ujian tengah semester (UTS) maupun ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan secara bebas, artinya, mahasiswa difabel netra dibebaskan untuk mencari pendamping sendiri untuk membacakan soal dan menuliskan jawaban pada saat ujian berlangsung. Akan tetapi, dengan semakin banyaknya jumlah mahasiswa difabel netra di UIN Sunan Kalijaga, maka kekhawatiran akan timbulnya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran bagi mahasiswa difabel netra pun menjadi suatu permasalahan serius. Untuk itu, PLD sebagai lembaga pemberi layanan bagi mahasiswa difabel netra mendorong pada tiap-tiap fakultas untuk dapat melaksanakan ujian mandiri bagi difabel netra dengan menggunakan komputer bicara sebagai media evaluasi. Namun begitu, minimnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta tidak tersedianya komputer bicara di masing-masing fakultas membuat ujian mandiri ini tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh diseluruh fakultas di UIN Sunan Kalijaga. Dengan demikian, pelaksanaan ujian bagi mahasiswa difabel netra sementara ini hanya dapat dilaksanakan dengan pendampingan.

Dalam perkembangannya, untuk meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam ujian, serta untuk menjaga agar hasil evaluasi pembelajaran tetap obyektif, maka pelaksanaan ujian dengan pendamping pun diresmikan dengan surat tugas menjadi pendamping dari PLD. PLD sebagai salah satu lembaga yang bertugas melayani kebutuhan peserta didik dalam hal ini tentu dipandang sangat representatif untuk memberi tugas kepada relawan untuk melaksanakan kegiatan pendampingan ujian. Disamping itu, PLD juga memiliki peranan penting membentuk relawan yang bertanggung jawab dan dapat melaksanakan tugas pendampingan sesuai dengan norma dan etika kerelawanan yang berlaku. Adapun untuk tes sumatif yang diberikan oleh dosen dalam bentuk tugas individu ataupun kelompok, mahasiswa difabel netra mengerjakannya dengan bekerja sama dengan teman sekelas atau relawan PLD dan mengumpulkannya dalam bentuk

print out atau soft copy.¹

2) Ujian dengan pendamping resmi di beberapa sekolah inklusi.

Di beberapa sekolah inklusi, pelaksanaan evaluasi pembelajaran baik dalam bentuk ujian tengah semester (UTS) maupun ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan dengan pendamping resmi. Pihak sekolah menugaskan guru untuk membacakan soal kepada peserta didik yang mengalami difabel netra. Selanjutnya peserta didik akan menuliskan jawabannya dengan huruf braille. Kemudian, setelah pelaksanaan ujian, guru pendamping khusus (GPK) mentranslate jawaban tersebut ke dalam huruf biasa. Ujian semacam ini diterapkan di sekolah-sekolah inklusi yang memiliki peserta didik anak difabel netra, dan memiliki GPK. Hal ini juga berlaku pada tes sumatif seperti ulangan harian, pekerjaan rumah, dimana siswa difabel netra akan mengerjakan soal dengan huruf braille yang selanjutnya dialih-hurufkan oleh GPK.²

b. Ujian dengan pendamping bebas.

Ujian dengan pendamping bebas adalah ujian yang dilakukan oleh peserta didik difabel netra yang membawa pendamping tersendiri tanpa adanya lembaga yang secara resmi memberikan tugas pendampingan tersebut. Ujian semacam ini banyak dilaksanakan di berbagai universitas-universitas yang menerima difabel (dalam hal ini difabel netra) akan tetapi belum memiliki lembaga yang menaungi atau memberikan pelayanan khusus aksesibilitas bagi mereka. Saat ujian, mahasiswa difabel netra meminta tolong kepada temannya untuk mendampinginya pada waktu melaksanakan ujian.

Selain beberapa bentuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran di atas, terdapat juga bentuk ujian lisan. Dalam ujian ini, penguji langsung memberikan soal secara lisan kepada peserta didik, kemudian peserta didik akan menjawabnya dengan lisan. Ujian semacam ini biasanya dilaksanakan pada waktu ujian praktik, dan ujian tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi). Namun begitu, terdapat mata kuliah atau mata pelajaran tertentu yang biasanya

¹ Wawancara dengan Abdullah Fikri, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tanggal 16 Agustus 2015

² Wawancara dengan Deni Septyanugroho, Siswa MAN 5 Maguoharjo, pada tanggal 16 Agustus 2015

mengharuskan adanya ujian lisan. Contoh, seorang mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa, pada saat melaksanakan ujian speaking atau kalam, biasanya ujian tersebut dilaksanakan secara lisan.³

Pengalaman penulis saat masih duduk di bangku perguruan tinggi, juga pernah mengalami ujian lisan. Yang menarik dari ujian lisan ini adalah bahwa dosen yang bersangkutan saat mengetahui penulis adalah seorang difabel netra, menawarkan kepada penulis untuk langsung menguji secara lisan. Dengan demikian, ujian lisan itu sendiri dapat dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan:

- 1) Bentuk ujian lisan sangat tepat untuk mengevaluasi mata kuliah atau mata pelajaran tertentu seperti ujian praktik dan ujian speaking atau kalam.
- 2) Bentuk ujian lisan dikehendaki oleh penguji.
- 3) Bentuk ujian lisan dapat dijadikan satu model evaluasi pembelajaran yang adaptif bagi peserta didik difabel netra.

E. Kesimpulan

Tiap peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dari segi metode, media, maupun bentuk evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini merupakan kewajiban dari lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebab, dalam rantai kurikulum pendidikan yang kaku, seorang tenaga pendidik harus memiliki kecakapan dalam memodifikasi metode, media, dan juga evaluasi pembelajaran agar dapat diterapkan dan mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, komunikasi antara pendidik dan peserta didik harus dijaga agar terjalin saling pengertian antara pendidik dan peserta didik.

Untuk mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran inklusif, maka evaluasi pembelajaran pun harus bersifat inklusif. Dari pemaparan di atas, setidaknya dapat dirumuskan beberapa metode evaluasi pembelajaran dalam sistem pendidikan inklusif, khususnya bagi peserta didik difabel netra, yang dapat dijadikan acuan diberbagai satuan pendidikan, baik sekolah dasar dan

³ Wawancara dengan Abdullah Fikri, Mahasiswa Pascaarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tanggal 16 Agustus 2015

menengah maupun di perguruan tinggi. Metode-metode tersebut adalah: ujian mandiri dengan komputer bicara, ujian dengan menggunakan pendamping resmi ataupun pendamping bebas, dan ujian dalam bentuk lisan.

Beberapa metode evaluasi inklusif tersebut, telah sering dilakukan. Namun demikian, dalam perkembangan proses pendidikan inklusif selanjutnya, tidak menutup kemungkinan ditemukannya metode-metode baru yang dapat digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Selain itu, hal yang terpenting dalam proses pelaksanaan pendidikan inklusif adalah jalinan komunikasi antara tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga persoalan-persoalan akademik dapat ditemukan solusinya.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Zainal, (1991). *Evaluasi Instruksional Prinsip Teknik Prosedur*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fakih, Mansour, (2011). Panggil Saja Kami Kaum Difabel, dalam Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Joni, M. Yulianto, (2014). Discourse Pengistilahan di Indonesia: Lahirnya Konsepsi Difabel, dalam *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB: Yogyakarta.
- Lexy J Moleong, (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nurgiantoro, Burhan, (2010). *Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi*, Yogyakarta: BPFE.
- Preamble United Nations Convention on The Rights of Persons With Disabilities (UN-CRPD) point e.*
- Prof., Dr. Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfa Beta.
- Salim, Ishak, (2015). Kontestasi Konsep Disabilitas di Indonesia, dalam *Difabel Merebut Bilik Suara Kontribusi Gerakan Difabilitas dalam Pemilu Indonesia*, SIGAB: Yogyakarta.
- Sudijono, Anas, (1996). *Pengantar Evaluasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafi'ie. M, Purwanti, dan Mahrus Ali, (2014). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB: Yogyakarta.
- Thoha, Chabib, (1996). *Teknik Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- UU No 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, bab III, pasal 4, ayat 1.
- UU No. 4 tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat* Pasal 1 point 1
- UUD 1945, pasal 30, ayat 1.

Skripsi

- Skripsi Hendro Sugiyono Wibowo, *Penerapan Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Tunanetra Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Ajaran 2010/2011)*, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Website

"<http://www.who.int/topics/disabilities/en/>" diakses pada 21 April 2015

Didi Tarsidi: Pendidikan Inklusi: Latar-Belakang, Sejarah dan Konsep: (http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195106011979031_DIDI_TARSIDI/Makalah%26Artikel_Tarsidi_PLB/Pendidikan_Inklusif_Indonesia.pdf) diakses pada 15 Agustus 2015

Disability: Definition, Types & Models <http://www.disabled-world.com/disability/types/> diakses pada 21 April 2015

Drs. Sunaryo, M.Pd: *MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF (KONSEP, KEBIJAKAN, DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN LUAR BIASA)*: (http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195607221985031-SUNARYO/Makalah_Inklusi.pdf)

Harta Nining Wijaya: KURIKULUM 2013 MENDISKRIMINASI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS (<http://solider.or.id/2014/08/18/kurikulum-2013-mendiskriminasi-siswa-berkebutuhan-khusus>) diakses pada 15 Agustus 2015

Slamet AS: 184 RIBU ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS BELUM NIKMATI PENDIDIKAN (<http://www.antaranews.com/berita/395235/184-ribu-anak-berkebutuhan-khusus-belum-nikmati-pendidikan>) diakses pada 15 Agustus 2015

TAHUN 2014, ABK MEMILIKI BUKU KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS: (<http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/2122>) diakses pada 15 Agustus 2015

The 7 Principles: Centre for Excellence in Universal Design (<http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/>) diakses pada 10 Agustus 2015

Wawancara

Abdullah Fikri, Mahasiswa Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Tanggal 16 Agustus 2015.

Deni Septyanugroho, Siswa MAN 5 Maguoharjo, pada tanggal 16 Agustus 2015.

